ORGANISASI-DAN-TATA-KERJA-UNIT-PELAKSANA-TEKNIS-LINGKUP-DIREKTORAT-JENDERAL-
PETERNAKAN-DAN-KESEHATAN-HEWAN
2020

PERMENTAN NO. 43, BN. 2020, 33 HLM.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

- ABSTRAK : - untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Pertanian yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian, sehingga ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 45 Tahun 2015; Permentan No. 40 Tahun 2020.
 - Peraturan Menteri ini mengatur kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi UPT lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang terdiri atas: Pusat Veteriner Farma, Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan, Balai Besar Veteriner, Balai Besar Inseminasi Buatan, Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden, Balai Inseminasi Buatan, Balai Embrio Ternak, Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan, Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan, Balai Veteriner, Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak, Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar, Loka Veteriner Jayapura; Kelompok Jabatan Fungsional UPT lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan; tata kerja UPT lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan; jabatan pada UPT lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan; lokasi UPT lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan; jenis komoditas ternak pada UPT lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2020.
- Pada saat peraturan menteri ini berlaku, maka Perubahan organisasi dan tata kerja UPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara